

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Konsep	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Strategi Komunikasi Bencana pada Masyarakat Kabupaten Buton Selatan Ansar Suherman, 2018	Memahami bentuk strategi komunikasi pra bencana yang dijalani tokoh masyarakat sebagai komunikator dalam mempersiapkan masyarakat dalam daerah rawan bencana di Kabupaten Buton Selatan.	Komunikasi Bencana Efektif Komunikasi persuasive Strategi komunikasi interaktif Teori komunikasi pengurangan ketidak pastian.	Deskriptif-kualitatif Studi kasus Teknik pengumpulan data: observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat Kabupaten Buton Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai cara untuk berkomunikasi secara interaktif saat mempersiapkan bencana. Dengan memilih tokoh atau aparat desa sebagai sumber dan komunikator yang kredibel, pesan dapat mudah diterima oleh masyarakat di Kawasan Kaki Gunung Burangrang.
2.	Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.	Mengetahui, mendapatkan data dan informasi yang objektif tentang bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang	Konsep kebijakan public. Konsep implementasi kebijakan. Komunikasi bencana.	Deskriptif-kualitatif Teknik pengumpulan data: studi kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi.	Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kegagalan ini termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai dalam

	Mulyawati Cicana, 2021	menerapkan kebijakan mitigasi bencana.			hal teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang, dan kekurangan anggaran.
3.	Komunikasi Partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Karmila Muchtar, Ninuk Purnaningsih, Djoko Susanto (2014).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi partisipatif diterapkan di Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). SL-PTT adalah inovasi baru yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produksi padi dengan pendekatan bottom-up dan pendekatan komunikasi partisipatif.	Komunikasi Partisipatif.	Metode survei-kualitatif. Teknik pengumpulan data: kuisioner, FGD, observasi, wawancara.	Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT di Desa Abbokongeng telah berjalan, meskipun belum optimal di setiap tahapan. Proses penerapan komunikasi partisipatif pada program SL-PTT diukur melalui indikator kesempatan berdialog, keaktifan petani Dalam program SL-PTT, faktor-faktor seperti kesempatan untuk berbicara, keaktifan petani untuk bertanya dan memberi saran, tanggapan penyuluh, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi petani.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Strategi Komunikasi Bencana pada Masyarakat Kabupaten Buton Selatan” (2018), ditemukan bahwa ada perbedaan teori dalam cara penelitian ditulis. Dalam studi sebelumnya, teori pengurangan ketidakpastian digunakan. Dalam penelitian terdahulu ini, mahasiswa dan dosen berpendapat bahwa media lokal dapat mengurangi kepanikan masyarakat karena isu-isu dan rumor yang tidak bertanggung jawab dan mendidik masyarakat agar lebih waspada terhadap bencana. Penelitian sebelumnya menggunakan metode interaktif yang lebih menekankan nilai-nilai humanis dan budaya baru. Ini dapat mengubah perspektif masyarakat tentang pembangunan. Penelitian terdahulu ini menyelidiki proses perubahan dalam perilaku berkomunikasi korban tsunami dari berbagai budaya. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana gerakan Safe School Movement menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif dalam strategi mitigasi bencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang” (2021), terdapat perbedaan dalam tujuannya. Tujuan penelitian terdahulu ini yakni untuk mempelajari dan memperoleh informasi yang objektif tentang metode mitigasi bencana yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini, kami menyelidiki sejumlah variabel yang dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk pelaksanaan kebijakan, termasuk sumber daya manusia dalam hal ilmu teknologi; perbedaan pendapat implementor tentang pencegahan bencana tentang cara mitigasi bencana; dan masyarakat yang kurang pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan bahaya bencana.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Komunikasi Partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)” (2014), Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan komunikasi partisipatif di Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), yang merupakan inovasi untuk meningkatkan produksi padi dengan pendekatan bottom-up. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa tujuan dari pendekatan komunikasi partisipatif yang digunakan oleh 80 petani dalam

program SL-PTT diukur melalui kesempatan untuk berbicara, keaktifan petani untuk bertanya dan memberi saran, dan jumlah kesempatan yang diberikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana di Kabupaten Sumedang melalui penggunaan metode komunikasi partisipatif.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Komunikasi Bencana

Komunikasi saat ini telah menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen darurat, penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat umum, pejabat terpilih, dan komunitas, serta media, sangat berperan dalam mengelola tanggap bencana dan pemulihan dengan efektif. Komunikasi tentang kesiapsiagaan dan mitigasi mendorong tindakan yang mengurangi risiko bencana di masa depan. Menyampaikan kebijakan, tujuan, dan prioritas kepada *staff*, mitra, dan peserta meningkatkan dukungan dan mengoptimalkan operasi manajemen bencana. Dalam berkomunikasi dengan public, menjalin kemitraan dengan media dan aktif berpartisipasi dalam media social adalah kunci untuk merancang strategi yang sukses (Haddow & Haddow, 2014).

Komunikasi melibatkan pengalihan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada dua jenis proses yang bisa terjadi di dalam komunikasi:

- 1) Transmisi informasi, yang merupakan proses satu arah di mana informasi dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain.
- 2) Berbagi Informasi, yang melibatkan proses saling menguntungkan atau bersama-sama antara pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Dalam manajemen bencana, model transmisi (proses satu arah) terutama digunakan di mana informasi disebarkan oleh lembaga darurat untuk peringatan dan pesan singkat. Sebaliknya, gagasan berbagi informasi mengimplikasikan proses bersama atau menguntungkan. Penggunaan media social sebagai alat komunikasi darurat secara melekat melibatkan berbagi informasi dua arah. (Haddow & Haddow, 2014).

Komunikasi bencana dapat dikategorikan berdasarkan panjangnya periode komunikasi. Komunikasi “akut” terjadi selama keadaan darurat di mana ada. Kebutuhan akan penyebaran informasi penting dengan cepat. Di sisi lain, komunikasi “jangka Panjang” terjadi selama periode yang diperpanjang sebelum dan setelah kejadian atau bencana darurat, misalnya pengurangan risiko bencana (Dufty, 2020).

Komunikasi memiliki peran krusial dalam membantu penyaluran pesan informasi terkait bencana. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengoordinasikan informasi bencana dari pusat ke daerah, menyebarkan informasi bencana dari daerah terkena dampak ke seluruh wilayah di Indonesia, dan juga memberikan informasi tentang penyintas dan relawan sebagai langkah mitigasi bencana (Lestari, 2018).

Mengkomunikasikan informasi tentang persiapan dan mitigasi mendorong tindakan yang dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Mengkomunikasikan kebijakan, tujuan, dan prioritas kepada staff, mitra, dan peserta meningkatkan dukungan dan mendorong operasi manajemen bencana yang lebih efisien. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, membentuk kemitraan dengan media dan berpartisipasi aktif di media social menjadi kunci dalam menerapkan strategi yang sukses (Dufty, 2020).

Untuk mengurangi kemungkinan bencana, informasi yang tepat dan akurat sangat penting. Solusi termasuk menyiapkan seluruh masyarakat untuk menangani bencana. Tujuan kesiapsiagaan adalah untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul saat bencana terjadi. Untuk mengatasi masalah itu secara efektif, berbagai strategi dapat direncanakan dan sumber daya tambahan diperlukan. Adanya komunikasi yang efektif dari stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana adalah kunci keberhasilan upaya untuk mengurangi risiko bencana. (Lestari, 2018).

Strategi komunikasi bencana yang efektif bertujuan untuk memberi masyarakat informasi yang akurat dan tepat waktu selama empat tahap manajemen darurat. (Haddow & Haddow, 2014):

1. Mitigasi: menganjurkan implementasi rencana, teknologi, dan tindakan yang dapat mengurangi korban jiwa akibat kerugian properti dalam keadaan bencana.
2. Kesiapsiagaan: mengkomunikasikan pesan kesiapsiagaan yang mendorong dan memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana.
3. Tanggap: menyediakan, memberitahukan, peringatan, petunjuk evakuasi, dan laporan situasi kepada masyarakat selama bencana berlangsung.
4. Pemulihan: memberikan panduan kepada individu dan komunitas yang terkena dampak bencana tentang cara mendaftar dan menerima bantuan dari pemulihan bencana.

Komunikasi sebelum bencana akan mencakup informasi yang akurat, koordinasi, dan kerja sama, terutama untuk masyarakat yang rentan bencana. Komunikasi yang efektif dalam penanggulangan bencana termasuk komunikasi saat tanggap darurat, prabencana atau kesiapsiagaan, dan setelah bencana atau selama rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena kegagalan komunikasi dapat menyebabkan kematian penyintas jiwa dan kerugian lainnya, hal ini membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak (Lestari, 2018).

Menurut Haddow & Haddow (2014), terdapat 5 landasan dari strategi komunikasi bencana yang efektif dibentuk oleh lima asumsi kritis seperti berikut:

- 1) *Customer focus*, salah satu elemen penting dari setiap sistem manajemen darurat yang efektif adalah fokus pada pelanggan dan pelayanan pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat dan relawan. Filosofi ini harus menjadi panduan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan dengan semua mitra dalam manajemen darurat. Pendekatan pelayanan pelanggan mencakup dan menempatkan kebutuhan dan kepentingan individu serta komunitas terlebih dahulu, mengerti informasi yang dibutuhkan oleh

pelanggan dan mitra, serta membangun mekanisme komunikasi yang menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu dan akurat.

- 2) *Leadership commitment*, Pemimpin dalam organisasi manajemen darurat harus berdedikasi untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara efektif, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin yang terlibat dalam tanggap darurat juga harus berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang efektif dan terlibat secara aktif dalam proses komunikasi.
- 3) *Inclusions of communications in planning and operations*, Spesialis komunikasi harus terlibat dalam semua tahapan perencanaan dan operasi darurat untuk memastikan bahwa pengiriman informasi yang akurat dan tepat waktu dipertimbangkan saat keputusan bertindak diambil. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa masalah komunikasi dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan dan bahwa elemen komunikasi termasuk dalam semua aktivitas, rencana, dan operasi organisasi.
- 4) *Situational awareness*, Untuk membuat rencana komunikasi yang efektif untuk mendorong program kesiapsiagaan dan/atau mitigasi komunitas, diperlukan informasi rinci tentang jenis risiko yang mempengaruhi komunitas, bagaimana program kesiapsiagaan yang direncanakan akan membantu individu dan komunitas, serta program mitigasi yang akan mengurangi dampak bencana di masa depan.
- 5) *Media partnership*, Media, seperti radio, televisi, dan surat kabar, sangat penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Berkolaborasi dengan media berarti memiliki pemahaman tentang apa yang diperlukan oleh media dan tim yang terlatih untuk bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada publik.

2.2.1.2 Komunikasi Pra-Bencana

Komunikasi pra-bencana adalah sistem komunikasi yang dirancang untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor yang menyebabkan bencana, seperti mengurangi paparan terhadap ancaman bahaya, mengurangi kerentanan penduduk dan aset, dan melakukan manajemen yang bijaksana terhadap lahan dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana. (Lestari, 2018)

Menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (2018), *Disaster Risk Reduction* (DRR) merupakan upaya konseptual dan praktis untuk mengurangi risiko bencana melalui analisis dan tindakan sistematis untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan bencana.

Contoh-contoh dari *Disaster Risk Reduction* (DRR) mencakup:

- 1) Mengurangi paparan terhadap bahaya;
- 2) Mengurangi kerentanan manusia dan property;
- 3) Perencanaan dan pengelolaan lahan untuk mengurangi risiko;
- 4) Meningkatkan kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk kejadian buruk

Salah satu dari empat prioritas tindakan dalam Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 adalah “Memahami Risiko Bencana” (United Nations, 2015). Biasanya, analisis risiko bencana, terutama untuk bahaya alam, dilakukan sepenuhnya oleh pihak berwenang, entah itu lembaga pemerintahan atau konsultan risiko bencana khusus. Sebagai contoh, dalam kasus banjir, proses tersebut biasanya melibatkan permodelan hidrologi dan hidraulik yang dilakukan oleh pakar banjir.

Risiko bencana timbul ketika ancaman berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebanyakan bencana berasal dari peristiwa hidrometeorologi. Meskipun kesadaran dan penerimaan akan pentingnya pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas respons terus berkembang, bencana, terutama dalam pengelolaan

dan pengurangan risikonya, tetap menjadi tantangan global (United Nations dalam Annisa et al., 2021)

Menurut Haworth, et al., (2020) Partisipasi dalam pemetaan (*participatory mapping*) memungkinkan masyarakat untuk menentukan daerah yang mereka lihat sebagai daerah yang rentan dan rentan terhadap bahaya, serta untuk menentukan tindakan pengurangan risiko yang diinginkan dan bermanfaat.

Pengurangan risiko bencana adalah ide dan praktik untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis dan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan bencana (United Nations, 2018). Pengurangan risiko bencana membantu meningkatkan ketahanan dan pembangunan berkelanjutan dengan mengelola dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada (Dufty, 2020).

Untuk mengurangi risiko bencana, menghadapi tantangan saat ini dan bersiap menghadapi tantangan di masa depan, diperlukan tindakan. Fokusnya adalah pengawasan, penilaian, dan pemahaman risiko bencana serta penyebaran informasi tentang bagaimana bencana terjadi. Ini memerlukan peningkatan tata kelola risiko bencana dan koordinasi antara lembaga dan sektor terkait, serta partisipasi penuh dan signifikan dari pemangku kepentingan yang relevan, seperti pemerintah, komunitas lokal, organisasi internasional, dan sebagainya. Langkah tambahan adalah meningkatkan sistem kesiapsiagaan, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta sistem peringatan dini dan respons. (United Nations, 2015).

Salah satu elemen utama dari *Disaster Risk Reduction* (DRR) adalah “mitigasi bencana”. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif dari suatu peristiwa berbahaya. (United Nations, 2018).

Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Mitigasi bencana adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk

mengurangi kemungkinan bencana terjadi, baik melalui pembangunan fisik maupun sosial, serta peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Tidak hanya diperlukan dalam situasi darurat bencana, komunikasi juga sangat penting sebelum dan sesudah bencana. Komunikasi adalah cara terbaik untuk sukses dalam mitigasi bencana, persiapan, respons, dan pemulihan situasi selama bencana.

Dalam siklus manajemen bencana, saat ini istilah “mitigasi” lebih sering digunakan daripada “pencegahan” untuk merujuk pada fase pertama, meskipun PPRR (*prevention-preparedness-response-recovery*) masih diadvokasi dalam literatur manajemen bencana. Pencegahan bencana mencerminkan konsep dan niat untuk sepenuhnya menghindari dampak *negative* potensial dari peristiwa berbahaya (Dufty, 2020).

Untuk mengarusutamakan dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana di semua sektor, serta meninjau dan mempromosikan keselarasan dan pengembangan lebih lanjut dari kerangka hukum, peraturan, dan kebijakan publik nasional dan lokal yang, dengan menetapkan peran dan tanggung jawab, membimbing sektor publik dan swasta maka tindakan mitigasi dicapai dalam: menangani risiko bencana pada layanan dan infrastruktur yang dimiliki, dikelola, atau diatur oleh pemerintah; mendorong dan memberikan insentif yang relevan bagi tindakan yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, komunitas, dan bisnis; meningkatkan mekanisme dan inisiatif yang relevan untuk transparansi risiko bencana, yang mungkin termasuk insentif keuangan, peningkatan kesadaran publik dan inisiatif pelatihan, persyaratan pelaporan dan langkah-langkah hukum serta administratif; dan membentuk struktur koordinasi dan organisasi (United Nations, 2015).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi risiko bencana melalui langkah-langkah yang direncanakan dan komprehensif, menggunakan berbagai pendekatan dan strategi yang meliputi:

- 1) Secara teknis, mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi efek dari suatu bencana.
- 2) Pendekatan manusiawi, bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman manusia terhadap bahaya bencana.
- 3) Pendekatan *administrative*, yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin organisasi dalam manajemen bencana, terutama dalam tahap mitigasi.
- 4) Pendekatan *cultural*, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bencana. Dengan pendekatan ini, upaya pencegahan bencana disesuaikan dengan nilai-nilai dan tradisi local yang telah ada dalam masyarakat untuk waktu yang lama.

2.2.1.3 Mitigasi Bencana

Menurut Ari Sandhyavitri, et al., (2021, p. 13), mitigasi bencana adalah kumpulan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menangani bencana.

Sedangkan Heru Sri Haryanto (2021), mengatakan bahwa mitigasi bencana adalah kerusakan pada pola kehidupan biasa, yang merugikan struktur sosial, kehidupan manusia, dan munculnya kebutuhan masyarakat.

Pengertian mitigasi menurut Wiriarto, (2017, p. 15) dalam buku “Tanggap Darurat Bencana Alam”. “Mitigasi bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda”. Dengan cara ini, mitigasi bencana adalah upaya yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya.

Untuk mengurangi kemungkinan bencana, penanggulangan bencana harus didukung dengan berbagai pendekatan, baik *soft power* maupun *hard power*. *Hard power* adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik, seperti membangun sarana komunikasi, tanggul,

dinding beton, dan mengeruk sungai, dll. Pendekatan *soft power* adalah mempersiapkan masyarakat melalui sosialisasi dan informasi tentang bencana. Dua hal ini dalam Undang-Undang disebut sebagai mitigasi bencana. Dua metode ini membutuhkan komunikasi bencana (Lestari, 2018).

Pilihan mitigasi bencana umumnya dibagi menjadi dua kategori, opsi *structural* dan opsi *non-structural*. Tindakan *structural* mencakup segala bentuk konstruksi fisik atau penggunaan teknik rekayasa untuk mengurangi atau menghindari dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Sebaliknya, tindakan *non-structural* tidak melibatkan pembangunan fisik dan menggunakan pengetahuan, praktik atau perjanjian untuk mengurangi risiko dan dampak bencana (Dufty, 2020).

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 33 tahun 2006 yang berkaitan dengan mitigasi bencana diantaranya:

1) Kebijakan Mitigasi Bencana.

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain:

- a) Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama bagi semua pihak, baik dari pemerintah maupun segenap unsur masyarakat. Ketentuan langkah-langkah ini diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- b) Mitigasi bencana harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinir dengan menggunakan seluruh kekuatan pemerintah dan masyarakat.
- c) Upaya pencegahan harus diprioritaskan untuk mengurangi kerusakan dan kematian.
- d) Meningkatkan kekuatan melalui kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan kampanye.

2) Strategi Mitigasi Bencana

Pelaksanaan kebijakan dapat dikembangkan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

a) Pemetaan

Strategi pemetaan sangat membantu bagi pengambilan keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Aktivitas pemetaan risiko partisipatif semakin meningkat popularitasnya dengan menggabungkan pengetahuan local dan kemampuan penduduk, pihak berwenang pemerintahan, dan spesialis pemetaan (Dufty, 2020). Namun demikian, penggunaan peta ini masih perlu dioptimalkan. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah:

- a. Peta belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- b. Peta yang dibuat belum disebarluaskan dengan baik.
- c. Peta bencana belum terintegrasi secara menyeluruh.
- d. Peta bencana yang dibuat menggunakan berbagai peta dasar, yang membuat integrasi lebih sulit.

b) Pemantauan

Untuk memudahkan evakuasi, antisipasi bencana dapat membantu mengetahui tingkat ketahanan secara dini. Di beberapa wilayah yang rawan bencana, pemantauan dilakukan di wilayah yang sangat penting dan strategis dari segi jasa dan ekonomi.

c) Penyebaran Informasi

Memberikan informasi tentang cara mengenali, mencegah, dan menangani bencana kepada individu atau komunitas masyarakat adalah salah satu cara penyebaran informasi. Salah satu cara penyebaran informasi adalah melalui media cetak dan elektronik tentang kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana di wilayah tertentu.

d) Sosialisasi dan Penyuluhan

Semua jenis penyuluhan dan sosialisasi kebencanaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan seseorang atau komunitas masyarakat untuk menghadapi bencana jika terjadi.

e) Pelatihan/pendidikan

Untuk membentuk tingginya kesiapan dalam menghadapi bencana, pelatihan difokuskan pada cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan pelatihan lebih ditekankan pada alur dari petugas lapangan hingga warga sekolah sampai pada tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana.

f) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberi tahu orang-orang tentang tingkat aktivitas hasil pengamatan yang berkelanjutan di suatu area yang rawan sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk bencana.

2.2.1.4 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dalam konteks bencana merujuk pada “pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh pemerintah, organisasi respons dan pemulihan, komunitas, dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana yang mungkin, mendekati, atau saat ini” (United Nations, 2018).

Adapun definisi lain dari “Kesiapsiagaan” menurut Marlyono, et al., (2016), berpendapat bahwa “Kesiapsiagaan adalah upaya untuk menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai bentuk sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu”. Maksud dari pemahaman ini adalah bahwa kesiapsiagaan dilakukan saat menghadapi situasi darurat yang dapat membahayakan setiap orang yang mengalaminya.

Peningkatan yang konsisten dari risiko bencana, termasuk meningkatnya eksposur manusia dan *asset*, bersama dengan pembelajaran dari pengalaman bencana sebelumnya, menunjukkan perlunya memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respons, mengambil tindakan antisipatif terhadap peristiwa, menggabungkan pengurangan risiko bencana dalam

kesiapsiagaan respons, dan memastikan bahwa kapasitas yang diperlukan tersedia untuk respons dan pemulihan yang efektif di semua tingkatan (United Nations, 2015).

Terdapat dua aspek utama dalam kesiapsiagaan bagi individu, organisasi dan komunitas (Dufty, 2020), yakni sebagai berikut:

- 1) Langkah-langkah pencegahan yang diperlukan sebelum terjadinya peristiwa berbahaya;
- 2) Pemahaman mengenai tindakan yang sesuai selama dan setelah terjadi peristiwa bahaya untuk melindungi diri dan property mereka.

Untuk mengalokasikan, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem peringatan dini yang berfokus pada masyarakat, lintas sektor, dan berbagai jenis bahaya, mekanisme komunikasi bencana dan keadaan darurat, teknologi *social*, serta sistem telekomunikasi pemantauan bahaya mengembangkan sistem-sistem tersebut melalui proses partisipatif. Proses ini melibatkan menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna, termasuk persyaratan sosial dan budaya, terutama yang berkaitan dengan gender. Ini mendorong penggunaan peralatan dan fasilitas peringatan dini yang mudah dan murah serta memperluas saluran penyebaran informasi peringatan dini bencana alam (United Nations, 2015).

untuk meningkatkan latihan rutin kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana, termasuk pelatihan evakuasi, dan pengembangan sistem dukungan berbasis wilayah untuk memastikan respons yang cepat dan efisien terhadap bencana dan situasi pengungsian terkait, termasuk akses ke tempat penampungan yang aman, makanan, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal (United Nations, 2015).

Tujuan dari kesiapsiagaan (Wiriarto, 2017, p. 17), adalah:

- 1) Mengurangi jumlah orang yang terluka, risiko kecacatan, dan kematian selama kejadian bencana;
- 2) Mengurangi kemungkinan bencana;
- 3) Mengatasi konsekuensi bencana terhadap kesehatan lingkungan.

Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan sebelum terjadinya gempa bumi (Wiriarto, 2017, p. 68) adalah sebagai berikut:

- 1) Menemukan tempat perlindungan yang aman;
- 2) Menyediakan persediaan logistic yang memadai;
- 3) Menyiapkan persediaan obat-obatan;
- 4) Memeriksa perabotan atau bingkai yang terpasang di tembok/dinding;
- 5) Mencari informasi mengenai lokasi evakuasi yang tepat.

Sebagian besar pembelajaran kesiapsiagaan masyarakat dilakukan melalui panduan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga darurat dan organisasi kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Bergantung pada risiko bahaya, setiap individu dan komunitas masyarakat harus mengetahui rute evakuasi yang sesuai dan aman jika memungkinkan, atau tindakan yang harus diambil jika tidak memungkinkan untuk mengungsi dari tempat tinggal atau lokasi lain (Dufty, 2020).

2.2.2 Participatory Communication

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi adalah pemberian kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan, mempengaruhi proses pembangunan, dan ikut menikmati hasilnya (Tawai & Yusuf, 2017, p. 9).

Menurut Tjokroamidjojo seperti yang dikutip dalam Ndraha (2022, p. 10), partisipasi oleh masyarakat mencakup keterlibatan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, serta ikut serta dalam mengemban tanggung jawab dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Partisipasi bisa dimaknai sebagai keterlibatan, keikutsertaan, dan kerjasama dari warga, baik sebagai individu maupun kelompok social atau organisasi masyarakat. Ini terjadi atas kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu (Tawai & Yusuf, 2017, p. 9).

Partisipasi dalam komunikasi memerlukan terlebih dahulu perubahan dalam pemikiran para “komunikator”. Komunikasi yang efektif antara orang-orang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara yang cepat, tetapi lebih pada kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Orang-orang sering merasa tidak didengarkan bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan, namun karena tidak ada yang peduli untuk mendengarkan mereka. Mendengarkan dengan tulus lebih efektif dalam membangun kepercayaan daripada terus-terusan berbicara (Servaes & Malikhao, 2005, p. 91).

Partisipasi dapat dicirikan sebagai *vertical* dan *horizontal*. Partisipasi *vertical* menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam program atau kegiatan yang digagas oleh pihak lain, dengan masyarakat berada dalam peran sebagai bawahan, klien, atau pengikut. Di sisi lain, partisipasi *horizontal* mencerminkan inisiatif masyarakat sendiri, dimana individu atau kelompok terlibat secara sejajar satu sama lain. Partisipasi ini mencerminkan perkembangan masyarakat yang mampu berkembang secara *independent* (Hutagulung, 2022, p. 22).

Secara umum, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi pada inisiatif pembangunan, dan penggunaan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mencakup semua bentuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah (Tawai & Yusuf, 2017).

Ada dua visi inti yang masih ada dalam komunikasi partisipatif saat ini. Pertama, teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan banyak orang dengan memberikan mereka kesempatan untuk bersuara; kedua, dasar kerjanya menetapkan prinsip-prinsip pendidikan yang menjadi bagian dari banyak model komunikasi partisipatif saat ini-komunikasi dialogis (Tufte & Mefalopulos dalam Syarah, 2016).

Oleh karena itu, pengembangan model komunikasi partisipatif harus terkait dengan proses pembebasan masyarakat secara keseluruhan di tingkat local, nasional, maupun internasional. Beberapa penulis telah mencoba

merangkum kriteria untuk model komunikasi tersebut. Sarjana Amerika Latin, Juan Somavia, merangkum komponen-komponen berikut sebagai hal yang penting untuk itu:

- 1) Komunikasi adalah kebutuhan manusiawi: memenuhi kebutuhan akan komunikasi sama pentingnya bagi suatu masyarakat seperti perhatian terhadap kesehatan, gizi, perumahan, pendidikan, dan pekerjaan. Bersama dengan kebutuhan social lainnya, komunikasi harus memungkinkan warga untuk membebaskan diri sepenuhnya. Hak untuk memberi informasi, serta hak untuk berkomunikasi, merupakan hak asasi manusia yang penting baik secara individual dan kolektif.
- 2) Komunikasi adalah hak asasi manusia yang dilegasikan: dalam konteks budaya, politik, ekonomi, dan sejarahnya sendiri, setiap masyarakat harus dapat menentukan secara independent bentuk konkret dari proses komunikasi sosialnya. Karena ada beragam budaya, maka juga dapat muncul berbagai struktur organisasi. Namun, apapun bentuk yang diwujudkan dalam fungsi komunikasi social, prioritas harus diberikan pada prinsip partisipasi dan aksesibilitas.
- 3) Komunikasi adalah bagian dari proses kesadaran, pembebasan, dan emansipasi masyarakat. Tanggung jawab social media dalam proses perubahan social sangat besar. Setelah periode pendidikan formal, media adalah agen pendidikan dan sosialisasi yang paling penting. Mereka mampu memberi informasi atau disinformasi, mengekspos atau menyembunyikan fakta penting, menafsirkan peristiwa secara positif atau negative, dan sebagainya.
- 4) Tugas komunikasi melibatkan hak dan kewajiban. Karena media sebenarnya memberikan layanan public, mereka harus melakukannya dalam kerangka tanggung jawab social dan hukum yang mencerminkan consensus social masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada hak tanpa kewajiban.

Beberapa prinsip muncul sebagai dasar yang penting dalam komunikasi partisipatif. Meskipun tidak mencakup semua prinsip, berikut adalah beberapa prinsip yang paling penting (Tufte & Mefalopulos dalam Syarah, 2016):

- 1) Menjaga *dialog* yang bebas dan terbuka, menurut Paulo Freire, *dialog* merupakan pertemuan antara individu untuk memberi nama pada dunia. Mereka yang telah kehilangan hak untuk menyuarakan pikiran mereka harus mengembalikan hak tersebut dan menghentikan tindakan pengecualian ini. Freire menganggap *dialog* yang bebas dan terbuka, adalah dimana individu dapat “memberi nama pada dunia”, sebagai suara, prinsip tindakan-refleksi-tindakan kembali, dan komunikasi horizontal.
- 2) Memberikan suara, dasar komunikasi dialogis adalah pemahaman tentang bagaimana kekuasaan berfungsi dalam setiap hubungan manusia. Fokus Freire adalah pergeseran kekuatan, yang memungkinkan kelompok yang terpinggirkan untuk berbicara dan memiliki waktu dan ruang untuk menyatakan masalah mereka, menemukan solusi, dan bertindak. Memikirkan peran media dalam komunikasi partisipatif adalah hal yang sama. Penguatan dan dukungan media komunitas dapat membantu kelompok yang paling terpinggirkan mendapatkan platform untuk mendiskusikan masalah mereka, menemukan solusi, dan mengungkapkan masalah mereka.
- 3) Pendidikan kebebasan, untuk menerapkan pendekatan pendidikan pembebasan ini, Freire menguraikan empat prinsip komunikasi: cinta, kerendahan hati (tanpa kesombongan), iman, dan harapan. Hasil yang logis dari pendidikan pembebasan adalah apa yang ia sebut sebagai kesadaran yang berorientasi pada tindakan.
- 4) Meskipun ada penekanan pada diskusi dan refleksi, komunikasi partisipatif juga sangat penting untuk tindakan. Proses pemberdayaan didasarkan pada refleksi terhadap masalah dan kolaborasi untuk menangani masalah secara kolektif. Ini merupakan elemen penting dari

komunikasi partisipatif. Ini menghubungkan "percakapan" dengan masalah yang ada di dunia nyata. Peningkatan kesadaran dan komitmen untuk bertindak adalah hasil utama dari komunikasi partisipatif.

Tidak ada kesepakatan yang umum mengenai definisi partisipasi: hal itu berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Beberapa pemangku kepentingan menganggap partisipasi sebagai upaya menggerakkan orang untuk menghilangkan hierarki yang tidak adil dalam pengetahuan, kekuasaan, dan distribusi ekonomi. Yang lain mengartikannya sebagai upaya mencakup masukan dari kelompok-kelompok yang relevan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah proyek pembangunan. Contoh-contoh tersebut mencerminkan dua pendekatan utama terhadap partisipasi: sudut pandang gerakan social dan sudut pandang berbasis proyek atau institusi (Tufte & Mefalopulos dalam Syarah, 2016).

Mengapa pendekatan partisipatif penting? Ada beberapa alasan. Dari sudut pandang institusional yang disebutkan sebelumnya, partisipasi dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak eksternal terhadap komunitas yang terlibat. Dari perspektif gerakan social yang disebutkan diatas, partisipasi itu sendiri bisa menjadi tujuan sebagai sebuah proses pemberdayaan (Tufte & Mefalopulos dalam Syarah, 2016).

Ketika menerapkan pendekatan partisipatif dalam komunikasi pada proyek-proyek pembangunan, terdapat pertanyaan-pertanyaan kunci dan kerangka prinsip-prinsip panduan untuk memangku praktisi dan pemangku kepentingan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Apa masalah pembangunan yang perlu diselesaikan: kekurangan informasi, kurangnya keterampilan, atau ketimpangan social?
- 2) Konsep budaya apa yang terkandung dalam pendekatan yang diajukan?
- 3) Apakah pemahaman tentang katalis atau agen perubahan sudah jelas?
- 4) Prinsip-prinsip apa yang membimbing pemahaman tentang pendidikan?

- 5) Apakah ada pemangku kepentingan atau audiens yang aktif untuk ditangani? Apa peran masing-masing individu tersebut dalam proses komunikasi?
- 6) Pesan apa yang akan disampaikan: contoh, pengalaman hidup, atau isu-isu *social*?
- 7) Apa tujuan perubahan: perilaku individu, norma social, hubungan kekuatan, struktur social, atau ekonomi?
- 8) Bagaimana hasil akan dipantau dan dievaluasi?
- 9) Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diinginkan?

Seseorang dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk, tergantung pada situasi dan keadaan. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (2017, p. 15), bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konsultasi sebagai layanan;
- 2) Sumbangan tanpa rencana dalam bentuk uang atau barang;
- 3) Menciptakan proyek yang dapat berdiri sendiri dan mendapatkan dana dari individu atau organisasi dari luar lingkungan tertentu (pihak ketiga).
- 4) Menciptakan proyek *independent* yang dibiayai oleh seluruh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas);
- 5) Sumbangan kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli lokal;
- 6) Tindakan massa;
- 7) Melakukan pembangunan dalam keluarga kecamatan;
- 8) Menciptakan proyek *independent* untuk komunitas.

Pelaksanaan berbagai bentuk ini tentu memerlukan persyaratan tertentu, salah satunya adalah ketersediaan sukarela untuk berperan serta, karena partisipasi terlibat dalam suatu masalah yang membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak di sekitarnya untuk mencapai tujuan (Tawai & Yusuf, 2017, pp. 15-16).

Menurut Club du Sahel dan Mikkelsen dalam Budiarjo (2022, pp. 12-13), beberapa strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan pasif, pelatihan, dan informasi menganggap bahwa pihak eksternal memiliki pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, partisipasi ini melibatkan komunikasi satu arah dari atas ke bawah dan hubungan *vertical* antara pihak eksternal dan masyarakat.
- 2) Pendekatan partisipasi aktif: pendekatan ini memberi masyarakat kesempatan untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan petugas eksternal melalui kunjungan dan pelatihan.
- 3) Pendekatan partisipasi dengan keterikatan: dalam pendekatan ini, masyarakat atau individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk memilih untuk terlibat dalam kegiatan tertentu, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- 4) Pendekatan partisipasi setempat: pendekatan ini menunjukkan pembangunan yang didasarkan pada keputusan masyarakat setempat.

2.3 Alur Penelitian

